



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan  
ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam  
Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun  
2010-2017**

Skripsi

Oleh

Florence

2015330058

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan  
ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam  
Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun  
2010-2017**

Skripsi

Oleh

Florence

2015330058

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung  
2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Florence  
Nomor Pokok : 2015330058  
Judul : Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun 2010-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 30 Juli 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

**Sekretaris**  
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

**Anggota**  
Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto, Drs., M.A.

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Florence  
NPM : 2015330058  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan  
ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam  
Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun  
2010-2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Agustus 2019

Florence

2015330058

## ABSTRAK

Nama : Florence

NPM : 2015330058

Judul : Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE dalam kasus pelanggaran perusahaan ZTE terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran tahun 2010-2017

---

Penelitian ini menggambarkan kebijakan luar negeri AS yang memberikan denda sebesar 900 miliar dollar AS sebagai sanksi kepada ZTE pada tahun 2017 atas ekspor ilegal ZTE yang melanggar sanksi ekonomi Iran. Sanksi ekonomi Iran sendiri merupakan suatu respon AS terhadap kebijakan Iran yang *hostile* seperti penyanderaan dan pembangunan nuklir yang mengancam aliansi AS seperti Israel dan Arab Saudi.

Perusahaan ZTE sebagai BUMN China kemudian terlibat dalam rivalitas antara AS dengan Iran dengan menyediakan teknologi yang diperlukan Iran untuk menyerang AS. AS yang merasa terancam menggunakan kekuatan ekonomi yaitu penguasaan pasar dan modal perusahaan ZTE sebagai hegemon untuk mengukuhkan perusahaan ZTE sebagai *transgressor* untuk mempertahankan dominasi politik hegemoni AS dari ancaman Iran. Dari fenomena ini, muncul pertanyaan “Bagaimana kebijakan luar negeri berupa sanksi pemerintah AS kepada perusahaan ZTE yang telah melanggar sanksi ekonomi Iran?” Untuk menjelaskan fenomena tersebut, peneliti menggunakan *hegemonic stability theory*. Peneliti juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri, *economic statecraft*, hegemoni, dan ketertiban internasional untuk mendalami analisis.

Kata kunci: hegemoni, sanksi ekonomi, AS, China, Iran, perusahaan ZTE, kepentingan nasional,

## **ABSTRACT**

*Name* : Florence

*NPM* : 2015330058

*Title* : *United States' Economic Sanctions against ZTE Company in case of ZTE Company's Violation of United States' Economic Sanction on Iran in 2010-2017*

---

*This study illustrates US economic sanction that was settled by 900 million US dollars fine for ZTE Company in 2017 that has violated U.S economic sanction on Iran. ZTE has pleaded guilty over their illegal export activities to Iran. U.S. sanction on Iran was in response to Iran's hostile behavior such as hostage crisis, nuclear development that threatened U.S. Alliance like Israel and Saudi Arabia. ZTE as China's state-owned enterprise was involved in US-Iran rivalry. ZTE provided Iran the technology that Iran needed for their attack on US. This threat has caused US to use US' economic power such as market dominance and capital to punish ZTE as transgressor to maintain US position as hegemony from Iran regime. From this phenomena, research question arises "How US economic sanction as US foreign policy is used against ZTE that has violated U.S sanction on Iran?" To explain this issue, this research used hegemonic stability theory. This research also use concept of foreign policy, economic statecraft, hegemony, and international order to support the analysis.*

*Keywords: hegemony, economic sanction, U.S, China, Iran, ZTE company, national interest*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas perlindungan diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE dalam kasus pelanggaran perusahaan ZTE terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran tahun 2010-2017.” Kasus ini disebabkan perbedaan kepentingan antara rising power dalam kasus ini Iran dan China yang diwakili perusahaan ZTE dengan AS sebagai hegemon.

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. selaku dosen yang telah membimbing penulis selama penyusunan penelitian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki penelitian ini agar berguna di masa yang akan datang. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembacanya.

Bandung, 5 Agustus 2019

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh akhir dari program sarjana Hubungan Internasional UNPAR yang telah saya jalani selama empat tahun sebagai salah satu fase dalam kehidupan saya. Pengalaman sarjana ini merupakan pengalaman yang berharga yang diwarnai dengan segala permasalahan juga sukacita atas pengalaman dan lingkungan pergaulan yang baru. Setelah melewati berbagai tantangan tersebut, saya pada akhirnya sampai di ujung studi saya yang juga sekaligus menandakan perubahan setingkat fase hidup saya lagi menjadi seorang yang lebih dewasa. Semua pengalaman ini akan menjadi guru dan kenangan berharga dalam hidup saya.

*Untuk Tuhan Yang Maha Esa,*

Terima kasih atas segala kasih, rahmat, dan perlindungan yang diberikan serta pertolongan untuk melancarkan segala jalan dan proses saya selama studi saya terutama saat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas pernyataan-Mu yang tidak berkesudahan dalam keadaan apapun.

*Untuk Mas Nyoman,*

Terima kasih atas kesediaan Mas Nyoman untuk mendampingi dan membimbing saya dari masa seminar sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas masukan, kritik, dan saran yang mengasah kemampuan saya untuk menulis dan melakukan penelitian. Terima kasih atas kesabaran dan kesempatan yang diberikan.

*Untuk Dosen Penguji, Bang Atom dan Mas Irawan,*

Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kekurangan pada skripsi terutama pada detail yang seringkali luput dari perhatian saya kepada Bang Atom. Terima kasih telah sabar walaupun saya terkadang melakukan kesalahan dalam bertutur kata karena kecemasan saya waktu sidang. Terima kasih kepada Mas Irawan atas saran yang sangat membangun untuk pengembangan analisis penelitian secara mendalam. Terima kasih juga atas dukungan saya untuk semakin yakin melangkah ke depan dalam urusan pekerjaan dan karir saya.



*Untuk Mama Tercinta,*

Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan selama skripsi ini sehingga saya dapat fokus kepada skripsi ini sampai akhir. Terima kasih atas kesabaran yang diberikan ketika saya malas dan mau menyerah. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengurus saya yang terkadang keras kepala. Terima kasih untuk selalu hadir mendengar segala keluhan seorang mahasiswi hubungan internasional dan seorang anak. Terima kasih karena telah menjadi seorang ibu yang baik, sahabat, pendengar, dan motivator yang baik. Saya beruntung memiliki seorang *role model* perempuan yang hebat seperti Mama.

*Untuk Papa dan Stefanus Michael Tjhia,*

Terima kasih atas dukungan yang diberikan baik moral maupun materiil. Terima kasih sudah datang ke sidang dan bahkan mengkhawatirkan anak serta adikmu yang sebenarnya tenang saja dalam perjalanan menuju sidang. Terima kasih atas kasih sayang yang terkadang unik tetapi saya akan terus belajar untuk memahami kalian berdua.

*Untuk Mai dan Cece Iing,*

Terima kasih untuk menjadi ibu kedua dalam hidup ini dan saya beruntung untuk selalu memiliki keluarga kedua yang senantiasa ada terutama ketika hidup saya sulit meskipun seringkali saya melupakan hal itu. Saya bahagia telah mengenal kalian dari kecil sampai sekarang. Kalian juga telah membesarkan saya sampai menjadi orang seperti ini.

*Untuk Erenca dan Hans,*

Terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang baik dan tempat berbagi suka duka selama proses pembuatan skripsi ini. Karena kita hampir berteman lebih dari sepuluh tahun, terima kasih untuk tetap berada di sana meskipun saya seringkali meninggalkan kalian. Terima kasih atas waktu dan kasih sayang kalian yang tidak terbalas.

*Untuk Livia dan Erviana,*

Terima kasih telah menjadi sosok teman senasib seperjuangan yang baik. Atas bantuan saya untuk mengurus segala macam administrasi yang seringkali gagal saya mengerti. Pada akhirnya, saya dapat wisuda bersama kalian.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv-v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi-viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi-xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-32</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1-6
1.2 Identifikasi Masalah .....	6-8
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9-10
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10-26
1.6 Kajian Literatur .....	26-30
1.7 Metode Penelitian.....	30-31
1.8 Sistematika Pembahasan .....	31-32
<b>BAB II Hubungan Amerika Serikat dengan Iran, dari: Era Shah Reza Pahlevi – Pemerintahan Hassan Rouhani</b> .....	<b>33-69</b>
2.1 Kerja sama AS dengan Iran pada era Pahlevi (1941-1979) .....	33-47
2.1.1 Kerja sama Iran-AS pada Perang Dunia II .....	33-39
2.1.2 Kerja sama AS-Iran sebagai penanda awal Perang Dingin .....	39-41
2.1.3 Nasionalisasi Minyak Pemerintahan Mohammad Mosaddeq (1951-1953) .....	41-46
2.1.4 Otokrasi Pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlevi (1951-1979) : Tekanan Politik Pemerintah.....	46-47
2.2 Konflik antara Amerika Serikat dengan Iran : Revolusi Iran tahun 1979....	48-57

2.2.1 Pergolakan politik Iran dan Respon AS .....	48-49
2.2.2 Memburuknya hubungan Iran-AS pada Pemerintahan Khomeini .....	50-51
2.2.3 Kebijakan minyak Iran pada Era Khomeini .....	51-52
2.2.4 Perdagangan senjata AS ke Iran pada Era Khomeini .....	52-54
2.2.5 Masalah hak asasi manusia pada Era Khomeini.....	54
2.2.6 Krisis Penyanderaan tahun 1979 .....	55-57
2.3 Kompetisi antara Amerika Serikat dengan Iran : Konflik antara Iran dengan Israel.....	57-70
2.3.1 Iran menggunakan kelompok teroris seperti Hezbollah dan Hamas untuk mengancam kepentingan Israel dan AS .....	59-62
2.3.2 Kebijakan Iran telah memperpanjang konflik di Suriah dan memfasilitasi kebangkitan ISIL sebagai bentuk kompetisi dengan Israel .....	62-63
2.3.3 Pengembangan senjata nuklir Iran .....	63-67
2.3.4 Pengembangan Program Misil Balistik di Iran .....	68-69
2.3.5 Iran melakukan cyberattacks kepada institusi pemerintahan, sektor finansial, dan sektor komersil .....	69-70
<b>BAB III Kebijakan Luar Negeri Sanksi Pemerintah AS Kepada Perusahaan ZTE Yang Melanggar Sanksi Ekonomi Iran .....</b>	
<b>71-128</b>	
3.1 “New World Order” yang dibentuk oleh AS .....	71-72
3.1.1 Tantangan terhadap New World Order yang diciptakan AS.....	72-79
3.1.2 Visi Amerika Serikat terhadap <i>International Order</i> .....	80-82
3.1.3 <i>International Order</i> dalam <i>National Security Strategy</i> .....	82-84
3.1.4 Pendekatan pembentukan <i>consent</i> dan tindakan koersif dalam menjaga <i>international order AS</i> .....	84-92
3.2 Pembentukan norma internasional : <i>Global Wars on Terrorism dan Rogue States</i> .....	92-98
3.2.1 <i>Global Wars on Terrorism</i> .....	92-93
3.2.2 <i>Rogue States</i> .....	93-96
3.2.3 Dampak dari kebijakan negara <i>rogue AS</i> .....	96-98
3.3 Legitimasi <i>International Order</i> AS dan relasi <i>power AS</i> sebagai hegemon.....	98-100

3.4 Pelanggaran Perusahaan ZTE terhadap Sanksi Ekonomi Iran sebagai tindakan <i>transgressor</i> .....	....100-123
3.4.1 Kronologi pelanggaran perusahaan ZTE .....	101-107
3.4.2 Ancaman terhadap <i>cybersecurity</i> AS .....	107-109
3.4.3 Ancaman <i>cybersecurity</i> AS: Ancaman sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri AS .....	109-111
3.4.4 Ancaman ekonomi : China sebagai rival ekonomi AS .....	111-115
3.4.5 Ancaman terhadap hegemoni AS: Iran dan China sebagai rising power dan <i>transgressor</i> .....	115-123
3.5 Hubungan antara AS sebagai hegemon dengan Iran dan China: Penggunaan Sanksi Ekonomi sebagai <i>economic statecraft</i> .....	123-139
3.5.1 Dampak sanksi ekonomi AS kepada Iran .....	123-126
3.5.2 Dampak pemberian sanksi ekonomi AS kepada industri telekomunikasi Iran.....	126-129
3.5.3 Dampak sanksi ekonomi AS terhadap kebebasan informasi dan komunikasi masyarakat sipil Iran .....	129-132
3.5.4 Dampak pemberian sanksi ekonomi AS kepada perusahaan ZTE ....	132-139
<b>BAB IV Kesimpulan .....</b>	<b>140-150</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Saham Pengiriman <i>Smartphone</i> Tahun 2016 Di AS .....	132
Grafik 2: Penjualan <i>Smartphone</i> Perusahaan ZTE Di China, AS, Dan Negara Lain. .....	133

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Total Penjualan Senjata AS Dengan Iran Dan Arab Saudi Tahun 1950-2017 Dalam Miliar Dollar AS.....	53
Tabel 2: Linimasa Pelanggaran Perusahaan ZTE Tahun 2010-2017.....	101

## DAFTAR SINGKATAN

AS	Amerika Serikat
ZTE	Zhongxing Telecommunication Equipment
IEEPA	International Emergency Economic Powers Act
IAEA	International Atomic Energy Agency
OFAC	Office of Foreign Assets Control
TCI	Telecommunication Company of Iran
Tamin	Ertebatat Tamin Shams Novin
GWOT	Global Wars on Terrorism
AEOI	Atomic Energy Organization of Iran
NCRI	National Council of Resistance
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	Hak Asasi Manusia
PLO	Palestine Liberation Organization
CIA	Central Intelligence Agency
ICJ	International Court of Justice
JCPOA	Joint Comprehensive Plan of Action
IRGC	Islamic Revolutionary Guard Corps
ICA	Iran Cyber Army
PFLP-GC	Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command
CCL	Commerce Control List
ITSR	Iranian Transactions and Sanctions Regulations
ITRSHRA	Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act

CISADA Divestment Act	Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and
EAR	Export Administration Regulations
ECCN	Export Control Classification Number
NSS	National Security Strategy
BIS	Bureau of Industry
ICT	Information and Communications Technology
VPN	Virtual Private Network
LAN	Local Area Networks
BUMN	Badan Usaha Milik Negara





# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat memberikan sanksi pada perusahaan Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE) atas pelanggaran sanksi ekonomi Iran sebagai upaya untuk mempertahankan norma internasional mengenai tindakan apa yang dapat diterima beserta konsekuensinya. Pada tahun 2017, perusahaan ZTE mengaku bersalah atas kasus pelanggaran sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. ZTE setuju untuk membayarkan ganti rugi sebesar 900 juta dollar<sup>1</sup>.

Perusahaan ZTE merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemerintahan China yang dibentuk pada tahun 1985. Perusahaan ZTE memiliki *headquarter* Shenzhen, Guangdong, China. Perusahaan ZTE merupakan perusahaan internasional yang memiliki berbagai anak perusahaan di Amerika Serikat, Swedia, Indonesia, Australia, Jerman, India, Hong Kong, Brasil, Myanmar, Singapura, dan Rumania<sup>2</sup>. Perusahaan ZTE merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi terbesar di dunia.

---

<sup>1</sup> Karen Freifeld dan Sijian Jiang, "China's ZTE pleads guilty, settles U.S. sanctions case for nearly \$900 million", *Reuters*, 7 Maret 2017, diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-zte/chinas-zte-pleads-guilty-settles-u-s-sanctions-case-for-nearly-900-million-idUSKBN16E1X1>.

<sup>2</sup> ZTE, "Introduction", diakses pada 2 Agustus 2019, [https://www.zte.com.cn/global/about/corporate\\_information](https://www.zte.com.cn/global/about/corporate_information).

Investigasi yang dilakukan selama lima tahun oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan ZTE melakukan konspirasi untuk menghindari embargo yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran dengan cara menggunakan komponen yang diproduksi Amerika Serikat dalam perangkat ZTE yang kemudian diekspor secara ilegal ke Iran. Jeff Sessions, Jaksa Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa pelanggaran ini bukan hanya sekedar pelanggaran perusahaan ZTE terhadap kontrol ekspor teknologi Amerika agar berada di luar jangkauan rezim seperti Iran tetapi ini juga merupakan tindakan ilegal yang sebelumnya tidak diakui oleh perusahaan ZTE<sup>3</sup>. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Asisten Jaksa Agung, McCord yang menyatakan bahwa dalam penyelidikan, ZTE seringkali berbohong kepada penyidik federal, pengacara, dan investigator internal<sup>4</sup>. Menurut McCord, pelaksanaan kontrol ekspor dan sanksi Amerika Serikat merupakan suatu komitmen AS untuk melindungi *national security* AS. Perusahaan yang melanggar peraturan ini termasuk perusahaan asing akan diinvestigasi dan mendapatkan sanksi yang setimpal<sup>5</sup>. Kasus pelanggaran ZTE ini kemudian diajukan ke pengadilan federal di Distrik Utara Texas dengan tuduhan pelanggaran terhadap *IEEPA (International Emergency Economic Powers Act)* yaitu penghalangan penegakan keadilan dan penyampaian

---

<sup>3</sup> Karen Freifeld dan Sijian Jiang, "China's ZTE pleads guilty, settles U.S. sanctions case for nearly \$900 million", *Reuters*, 7 Maret 2017, diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-zte/chinas-zte-pleads-guilty-settles-u-s-sanctions-case-for-nearly-900-million-idUSKBN16E1X1>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Department of Justice, "ZTE Corporation Agrees to Plead Guilty and Pay Over \$430.4 Million for Violating U.S. Sanctions by Sending U.S.-Origin Items to Iran," diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-agrees-plead-guilty-and-pay-over-4304-million-violating-us-sanctions-sending>.

statemen palsu dan perusahaan ZTE telah menerima tanggung jawab terhadap tindakan kriminal ini<sup>6</sup>. Perusahaan ZTE juga menyetujui penghapusan hak khusus ekspor yang ditunda dalam waktu tujuh tahun bila terjadi pelanggaran berikutnya yang disertai dengan masa percobaan selama tiga tahun, pengawasan perusahaan, dan program etika dan penyesuaian<sup>7</sup>.

Sanksi ekspor Amerika Serikat Iran sebagai bagian dari kebijakan luar negeri AS juga dimulai pada tahun 1979 semenjak hubungan AS dengan Iran memburuk dengan kejadian penyanderaan warga negara Amerika Serikat di kedutaan AS pada saat revolusi Iran berlangsung. Dalam upaya pelepasan sandera, administrasi Carter melakukan program sanksi komprehensif terhadap Iran seperti larangan terhadap pengiriman persenjataan militer, embargo impor minyak dari Iran dan pembekuan deposit Iran di bank AS. Kejadian penyanderaan ini kemudian berakhir pada tahun 1981 namun meninggalkan persepsi buruk yang mendominasi hubungan kedua negara ini. Amerika Serikat kemudian kembali menerapkan sanksi ekonomi pada Iran yang disebabkan oleh dua peristiwa yaitu keterlibatan Iran dalam pemboman markas angkatan laut AS di Beirut, Libanon pada tahun 1983 dan juga pada bukti penggunaan senjata kimia pada perang Iran-Irak<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> T. Clifton Morgan, et.al., "United States Policy Toward Iran: Can Sanctions Work?," (*Conjunction With An Energy Study By The Center For International Political Economy And The James A. Baker Iii Institute For Public Policy*, April 1998), 2-4.

Pada tahun 2002, Presiden George Bush menyatakan Iran sebagai bagian dari *axis of evil* bersamaan dengan Irak dan Korea Utara<sup>9</sup>. Penasihat *National Security* menyatakan bahwa *axis of evil* merupakan aliansi teroris yang mendukung gerakan terorisme baik dalam lingkup regional dan global. Sesuai dengan kebijakan George Bush mengenai peperangan global dengan terorisme menyatakan Iran sebagai potensi yang berbahaya di Timur Tengah<sup>10</sup>. Pada tahun yang sama, grup oposisi Iran menyatakan bahwa Iran sedang mendirikan fasilitas nuklir di Natanz dan Iran. Hal ini diikuti dengan penuduhan AS terhadap Iran mengenai program pembangunan senjata nuklir yang ditolak oleh Iran dengan tegas<sup>11</sup>. IAEA kemudian melakukan inspeksi fasilitas pada tahun 2003 yang diikuti dengan *Additional Protocol* untuk menghentikan aktivitas konversi dan enrichment sementara. Namun Iran menggunakan ambiguitas suspense ini dengan tetap melakukan percobaan nuklir<sup>12</sup>. Pada tahun 2010, AS memberikan sanksi *Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act* yang mencegah impor dari Iran dan melarang ekspor dari AS ke Iran. Pada tahun 2011, menambah sanksi pada Iran termasuk dengan memperketat larangan terhadap perusahaan yang menyediakan Iran dengan perlengkapan serta keahlian untuk menjalankan industri minyak dan kimia<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> BBC, "US-Iran relations: A brief guide," diakses pada 20 Februari 2018, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24316661>.

<sup>10</sup> PBS, "How Iran Entered The 'Axis'," diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/tehran/axis/map.html>

<sup>11</sup> BBC, "US-Iran relations: A brief guide," diakses pada 20 Februari 2018, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24316661>.

<sup>12</sup> NTI, "Iran", diakses pada 20 Februari 2018, <http://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/>

<sup>13</sup> Josh Levs, "A summary of sanctions against Iran," *CNN*, 23 Januari 2012, diakses pada 20 Februari 2018, <https://edition.cnn.com/2012/01/23/world/meast/iran-sanctions-facts/index.html>

Pada tahun 2016, sanksi internasional terhadap Iran telah diangkat yang mengizinkan sektor seperti minyak dan finance untuk kembali bergabung ke ekonomi global setelah keberhasilan upaya Iran dalam mengurangi program nuklir termasuk ekspor 98 persen dari uranium dan penutupan reaktor nuklir serta pembebasan tahanan seperti reporter Washington Post, Jason Rezaian<sup>14</sup>. Namun Amerika Serikat tetap menerapkan berbagai sanksi kepada Iran seperti International *Emergency Economic Powers Act (IEEPA)* yang memberikan presiden wewenang untuk membentuk regulasi mengenai perdagangan dengan negara asing dalam status darurat. *Executive Order* 13059 yang dikeluarkan pada 19 Agustus 1997 untuk melarang setiap perusahaan Amerika Serikat untuk mengekspor produk ke pihak ketiga untuk kemudian inkorporasi ke dalam produk tersebut untuk kemudian diekspor ke Iran<sup>15</sup>. Pada tahun 2013, *Office of Foreign Assets Control (OFAC)* dari *Department of the Treasury* menyatakan ekspor mengenai produk teknologi komunikasi ke Iran harus memperoleh izin dari OFAC terlebih dahulu<sup>16</sup>. Peraturan ini kemudian dilanggar oleh perusahaan ZTE yang melakukan kegiatan ekspor ke Iran.

Pelanggaran ZTE dimulai pada tahun 2010 yaitu pengembangan teknologi telekomunikasi di Iran melalui kerja sama dengan Telecommunication Company of Iran (TCI) yang memonopoli pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan

---

<sup>14</sup> Geoff Dyer dan Najmeh Bozorgmehr, "Iran sanctions lifted," *Financial Times*, 17 Januari 2016, diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.ft.com/content/7ca5b856-bc62-11e5-9fdb-87b8d15baec2>

<sup>15</sup> Gary Samore, "US Unilateral Sanction," *Sanctions Against Iran: A Guide to Targets, Terms, and Timetables*, (Cambridge : Harvard Kennedy School, 2015), 5.

<sup>16</sup> Kenneth Katzmann "What U.S.-Iran Trade Is Allowed or Prohibited", *Iran Sanctions Congressional Research Service*, (2018): 8.

dikendalikan pemerintah. Perusahaan ZTE membuat kontrak dengan menyediakan berbagai sistem multimedia, LAN, protokol internet televisi, dan sistem operasi yang menggunakan komponen yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ZTE juga membuat kontrak lain dengan Ertebatat Tamin Shams Novin (Tamin) untuk mendirikan seribu menara *cell* di Iran dengan menggunakan komponen AS. Perusahaan ZTE digunakan sebagai “*back-door channel*” untuk memperoleh teknologi AS bagi perusahaan di Iran<sup>17</sup>.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ZTE menyebabkan permasalahan bagi AS untuk mencapai kepentingan AS dalam menjaga *homeland security*. Sanksi ekonomi yang diberikan AS bertujuan untuk mencegah pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massal serta mencegah Iran untuk terlibat dalam kasus Israel-Palestina. Pelanggaran yang dilakukan ZTE menjadi tantangan bagi AS untuk mencapai objektif kebijakan luar negeri tersebut<sup>18</sup>.

Ekspor ilegal produk telekomunikasi AS seperti *software* Linux, Windows, Cisco, Oracle, Symantec dan produk hardware seperti HP dan Dell<sup>19</sup> yang dilakukan oleh perusahaan ZTE ke Iran dapat mengancam keamanan AS. Produk yang diekspor

---

<sup>17</sup> Jerrica Goodson dan Valeria Lincy, “Lesson Learned or Business as Usual?” *Iran Watch Report*, (2017): 3-4.

<sup>18</sup> Eric B. Shiraev dan Vladislav M. Zubok, “American Foreign Policy,” *International Relation Brief Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), 215-220.

<sup>19</sup> Thomas Hughes, *Article 19*, “Tightening the net: Internet freedoms in Iran,” 11 Desember 2017, diakses 19 Juni 2019, [https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38619/Iran\\_report\\_part\\_2-FINAL.pdf](https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38619/Iran_report_part_2-FINAL.pdf).

oleh perusahaan ZTE kemudian digunakan oleh Iran untuk melancarkan serangan siber terhadap sistem keamanan Amerika Serikat. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2011 yaitu insiden RQ-170 ketika ahli militer Iran dalam *cyber warfare* membajak dan mengendalikan U.S. Lockheed Martin RQ-170 yang merupakan *drone* siluman tanpa awak milik AS yang telah diakui oleh pernyataan Presiden Obama<sup>20</sup>.

Sementara di wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menghadirkan stabilitas dan ketertiban regional. Iran merupakan negara yang mendukung kegiatan terorisme melalui kelompok Hezbollah<sup>21</sup>. Iran telah lama melakukan praktik yang mengeksport revolusi ke negara tetangga di Timur Tengah seperti Lebanon. Beberapa tindakan Iran telah mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah.

Teknologi komunikasi yang diperoleh Iran ini juga digunakan untuk melakukan serangan terhadap perwakilan AS dan aliansi AS. Pada tahun 2016-2017, terjadi serangan berupa penghapusan dokumen di Arab Saudi yang dilakukan oleh pemerintah Iran<sup>22</sup>. Beberapa ancaman nyata yang kemudian muncul juga berupa spionase dan

---

<sup>20</sup> John Keller, "Iran-U.S. RQ-170 incident has defense industry saying 'never again' to unmanned vehicle hacking", *Military Aerospace Electronics*, 3 Maret 2016, diakses pada 2 Agustus 2019, <https://www.militaryaerospace.com/computers/article/16715072/iran-us-rq170-incident-has-defense-industry-saying-never-again-to-unmanned-vehicle-hacking>.

<sup>21</sup> Bipartisan Policy Center, "U.S. Policy Toward Iran," *Bipartisan Policy Center Strategic Options Report of the Task Force on Managing Disorder in the Middle East*, (2018): 7-8, diakses pada 11 Juni 2018, <https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2018/05/BPC-National-Security-Strategic-Options-on-Iran.pdf>.

<sup>22</sup> United States, Office of The Director of National Intelligence, *Statement of Record on Worldwide Threat Assessment of The US Intelligence Community*, Washington: The Director of National Intelligence, 2018, diakses pada 25 Desember 2018, <https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf>



serangan *cyber* yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Kehadiran Iran sebagai *rising middle power* di Timur Tengah juga mengancam kekuatan dan pengaruh rezim Arab Saudi yang merupakan aliansi AS<sup>23</sup>.

Melalui sanksi ekonomi, Amerika Serikat juga berusaha membangun dan mempertahankan norma internasional melalui dengan menentukan tindakan apa yang dapat diterima dan apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan tersebut baik kepada aliansi maupun negara lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh ZTE ini kemudian ditindak tegas untuk tetap mempertahankan *image* dan posisi AS di politik internasional. Beberapa upaya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asing China yang berada di AS juga meningkatkan ketegangan antara pemerintah China dengan pemerintah AS yang sedang terlibat dalam perang dagang<sup>24</sup>.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas melalui skripsi ini adalah pelanggaran perusahaan ZTE terhadap sanksi ekonomi AS terhadap Iran pada tahun 2010- 2017. Fokus pembahasan terletak pada kasus ekspor ilegal perusahaan ZTE yang melanggar sanksi ekonomi Iran serta keputusan pengadilan AS untuk memberikan denda kepada perusahaan ZTE pada tahun 2017.

---

<sup>23</sup> Bipartisan Policy Center, "U.S. Policy Toward Iran: Strategic Options Report of the Task Force on Managing Disorder in the Middle East," Mei 2018, <https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2018/05/BPC-National-Security-Strategic-Options-on-Iran.pdf>

<sup>24</sup> Klint Finley, "The Deal to Save ZTE Won't Resolve US-China Tensions," *Wired*, 6 Juli 2018, diakses pada 11 September 2018, <https://www.wired.com/story/the-deal-to-save-zte-wont-resolve-us-china-tensions/>.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian: “Bagaimana kebijakan luar negeri berupa sanksi pemerintah AS kepada perusahaan ZTE yang telah melanggar sanksi ekonomi Iran?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pemberian sanksi terhadap perusahaan ZTE yang melanggar sanksi ekonomi Iran sebagai alat politik luar negeri Amerika Serikat untuk menjalankan dan tetap mempertahankan kekuatan hegemoni.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kajian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai mata kuliah kebijakan luar negeri, politik global, dan politik ekonomi internasional dengan mengaplikasikan teori dan konsep dalam penelitian ini. Kajian ini juga diharapkan menambah wawasan dan kontribusi ilmiah pada studi hubungan internasional mengenai negara Amerika Serikat dan dampaknya sebagai suatu kekuatan politik dan ekonomi global. Studi ini diharapkan dapat mengembangkan kajian yang mendalam mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara *axis of evil* seperti Kuba, Iran, Irak, dan Korea Utara. Studi mengenai hubungan AS dengan Iran dan kebijakan proteksionis telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah tahun 1979 namun belum ada kajian khusus yang membahas hubungan antara perusahaan

asing seperti ZTE dengan pemerintah dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam mengenai isu yang belum dapat dibahas dalam kajian ini.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggambarkan Amerika Serikat kebijakan luar negeri yaitu pemberian sanksi terhadap perusahaan ZTE yang melanggar sanksi ekonomi AS terhadap Iran melalui *hegemonic stability theory* dalam paradigma realisme. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini membawa dampak penting sebagai salah satu negara hegemon yang dapat menjadi *norm entrepreneur* dan menegakkan hukum internasional dan *international order* sebagai bagian dari politik global Amerika Serikat. Sebagai negara hegemon, Amerika Serikat dapat menerapkan suatu kebijakan unilateral seperti sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan salah satu instrumen Amerika Serikat untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar juga dapat menentukan konstelasi politik internasional seperti pembentukan *axis of evil* terhadap negara Iran, Korea Utara, dan Kuba.

### **Pendekatan Realisme**

Pendekatan realisme klasik mempercayai bahwa aktor negara didasari oleh sifat manusia yang anarki dan penuh kekacauan sehingga satu aktor selalu mencurigai aktor lain<sup>25</sup>. Sifat anarki dalam sistem internasional ini mendorong aktor negara terjebak

---

<sup>25</sup> P. Toledo, "Classic Realism and the Balance of Power Theory," *Glendon Journal of International Studies, IV*, (2005) : 52-63, diakses pada 7 Maret 2019,

dalam konflik dimana setiap negara berusaha untuk memperoleh *power* dan dominasi. Perebutan *power* untuk menjamin keberlangsungan negara menjadi poin utama realisme. Untuk menjamin keberlangsungan negara, negara berusaha meningkatkan kapabilitas militer. Peningkatan kapabilitas militer ini sejalan dengan peningkatan rasa khawatir terhadap kapabilitas militer dan serangan negara rival. Hal ini mendorong terciptanya *security dilemma*.<sup>26</sup> *Security dilemma* merupakan dilemma yang terjadi ketika peningkatan *security* suatu negara menyebabkan penurunan *security* negara lain. Pada akhirnya hal ini mendorong kompetisi *power* antar negara yang berujung pada ketegangan politik dan konflik<sup>27</sup>.

Kompetisi dan kondisi konflik ini kemudian dikemukakan melalui teori *balance of power* yang menyatakan bahwa *balance of power*<sup>28</sup> merupakan salah satu cara untuk mencapai kondisi perdamaian. Teori menyatakan bila salah satu negara dalam sistem internasional meningkatkan *power* yang dimiliki sehingga terjadi transisi *power* secara global dan masif, negara lain yang terancam akan membentuk koalisi untuk melakukan *counter-balancing*.

Hans J Morgenthau salah satu realis melihat teori *balance of power* dari dua sudut pandang yaitu situasi dan kebijakan. Situasi *balance of power* berada dalam

---

<http://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/35205/31924>.

<sup>26</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relation Fifth Edition* (Oxford : Oxford University Press, 2012), 68.

<sup>27</sup> Goda Dirzauskaite dan Nicolae Cristinel Ilinca, "Theoretical Background," *Understanding Hegemony in International Relations Theories*, (Aalborg: Aalborg University, 2017), 21.

<sup>28</sup> Scott Burchill, *et.al*, "Realism and Neo-Realism," *Theories of International Relation*, (Hampshire : Palgrave, 2001), 73-76.

keadaan equilibrium atau disequilibrium. Sistem internasional berada di situasi yang seimbang antara negara yang berkuasa atau tidak seimbang ketika satu negara memegang power yang lebih besar dari negara lain sehingga dapat membentuk, mengubah, atau bahkan mengatur sistem internasional sebagai bentuk eksploitasi *power*<sup>29</sup>.

Hubungan antara *balance of power* dengan *collective security* menurut Kenneth Waltz bahwa merupakan suatu ilusi bahwa perlucutan senjata dapat membawa perdamaian. Hal yang memberikan *deterrence* bukan *disarmament* tetapi *sustained violence* yang digunakan oleh negara dengan kekuatan besar untuk menghukum negara atau ancaman terhadap perdamaian yang melakukan tindakan agresif. Negara menggunakan power untuk bertindak sebagai tindakan polisi dunia dan bukan tindakan perang. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Hans Morgenthau yang menyatakan bahwa *disarmament* dari negara dengan power sentral tidak dapat melalui perjanjian tetapi melalui kekerasan yang parah seperti yang terjadi pada *War of the Roses* di Inggris. Penulis W Johnson, kemudian menegaskan bahwa *balance of power dan collective security* hanya tercapai oleh kesepakatan yang dibentuk oleh *status quo*<sup>30</sup>.

Kenneth Waltz memiliki fokus yang berbeda dari Morgenthau. Waltz menggambarkan tatanan dunia dengan ‘kutub’ poles’. Kutub digambarkan sebagai jumlah dari negara yang berkuasa atau distribusi kapabilitas dan *power* untuk

---

<sup>29</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf, 1960), 16-20.

<sup>30</sup> Scott Burchill, *et.al*, “Realism and Neo-Realism,” 73-76.

menentukan stabilitas sistem internasional. Berbeda dengan pendapat ahli lain, Kenneth Waltz menyatakan bahwa sistem bipolar merupakan sistem paling stabil sedangkan sistem multipolar dan unipolar merupakan sistem yang paling tidak stabil<sup>31</sup>. Sistem unipolar pada umumnya ditandai dengan kehadiran hegemoni<sup>32</sup>.

Realisme yang fokus pada relasi power dan pergeseran kekuasaan dalam sistem internasional. Menurut pandangan realisme, hegemon itu sendiri akan menimbulkan ancaman bagi negara lemah karena negara hegemon memiliki kapabilitas untuk menciptakan dan memaksa aturan kepada negara lebih lemah<sup>33</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana akuntabilitas hegemon dipertanyakan bila tidak ada faktor eksternal yang dapat menahan tindakan hegemon. Setiap negara lain dalam sistem internasional bergantung pada kemauan hegemon untuk melakukan *self-restraint*<sup>34</sup>. Henry Kissinger menyatakan bahwa legitimasi kekuatan hegemon hanya dapat terbentuk dari konsensus antara negara dengan kekuatan besar. Bila konsensus tidak terjadi, kompetisi antar negara akan terjadi. Legitimasi dalam konsentrasi power yang terjadi ketika hegemon muncul kemudian dapat dipertanyakan<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: Random House, 1979), 89.

<sup>32</sup> Alexander Dulgin, "Multipolarity, Unipolarity, Hegemony - Theories And Concepts," *Geopolitica.ru*, diakses pada 25 Februari 2019, <https://www.geopolitica.ru/en/article/multipolarity-unipolarity-hegemony-theories-and-concepts>.

<sup>33</sup> A. Hurrell, "Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-be Great Powers?," *International Affairs*, 82(1), (2006): 1-20.

<sup>34</sup> Lebow R. N, *The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 111-121.

<sup>35</sup> Henry A. Kissinger, "The nature of statesmanship," *World Restored*, (London: Gollancz, 1997), 333-346.

## **Kebijakan luar negeri**

Konsep kebijakan luar negeri memiliki definisi berbeda dari berbagai ahli. Christopher Hill mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan hubungan eksternal yang dilakukan oleh aktor independen seperti negara dalam hubungan internasional. Namun, definisi ini hanya menjelaskan secara garis besar tren dalam kebijakan luar negeri dan bukan aksi dan keputusan individual. Kebijakan luar negeri menurut White sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan sebagai hubungan antara negara dengan aktor lain atau secara khusus negara lain dalam sistem internasional. White menjelaskan bahwa penjelasan ini belum mencakup bentuk lain dari aktor kolektif supranasional seperti Uni Eropa yang juga menjalankan kebijakan luar negeri. Rosenau menjelaskan definisi yang sederhana mengenai kebijakan luar negeri sebagai perilaku dan kebijakan suatu negara yang ditujukan secara eksternal. Brecher memiliki posisi bahwa kebijakan luar negeri hanya terbatas pada kebijakan dan bukan hanya perilaku negara yang dapat diukur<sup>36</sup>.

## **Hegemoni dan Unipolaritas**

Realisme<sup>37</sup> memandang hegemoni sebagai negara paling berkuasa dalam sistem internasional. Negara tersebut memiliki kapabilitas material seperti kapabilitas militer, ekonomi, diplomatik, dan terkadang *soft power* yang jauh lebih superior dibandingkan

---

<sup>36</sup> Derek Beach, "Introduction: Analyzing Foreign Policy," *Analyzing Foreign Policy 2nd edition*, (2019): 2.

<sup>37</sup> Brian Schmidt, "Hegemony: A conceptual and theoretical analysis," *DOC Research Institute*, 15 Agustus 2018, diakses pada 7 Maret 2019, [https://doc-research.org/2018/08/hegemony-conceptual-theoretical-analysis/#\\_ftn2](https://doc-research.org/2018/08/hegemony-conceptual-theoretical-analysis/#_ftn2).

negara lain<sup>38</sup>. Dalam pandangan ini, power seringkali disamakan dengan kapabilitas sementara kapabilitas suatu negara merupakan atribut suatu negara yang terdiri dari luas wilayah, jumlah populasi, kekuatan militer, ekonomi, sumber daya alam, stabilitas politik, dan juga kompetensi<sup>39</sup>.

Levy dan Thompson juga mendukung ini dengan menyatakan bahwa konsentrasi kapabilitas material dapat mendorong satu negara untuk lebih berkuasa dan mendominasi semua negara subordinat<sup>40</sup>. John Mearsheimer juga berpendapat bahwa hegemon sebagai negara yang sangat kuat sehingga mendominasi semua negara lain dalam sistem dan tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan militer untuk menyaingi negara tersebut. Bagi Mearsheimer, dominasi suatu sistem dapat diinterpretasikan sebagai dominasi seluruh dunia<sup>41</sup>.

Berdasarkan pengertian ini, konsep hegemoni dikembangkan dari suatu atribut dan kapabilitas yang dimiliki negara menjadi suatu bagian dari sistem internasional. Hal ini tampak jelas pada pendapat Robert Gilpin yang menyatakan bahwa hegemoni telah menghiasi sistem internasional pada kurun waktu tertentu. Struktur hegemoni dapat muncul ketika satu negara besar menguasai negara yang lebih lemah dalam sistem. Dalam struktur ini, sistem internasional yang anarki berubah menjadi hierarki. Gilpin menambahkan bahwa hegemoni menjadi kecenderungan yang umum terjadi

---

<sup>38</sup> Brian C. Schmidt, "Competing Realist Conceptions of Power," *Millennium*, 33(3), (2005): 523-549.

<sup>39</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: Random House, 1979), 131.

<sup>40</sup> J.S. Levy dan W.R Thompson, Hegemonic Threats and Great-Power Balancing in Europe, 1495-1999. *Security Studies*, 14(1), (2005) : 1-33

<sup>41</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton, 2001), 41.



pada masa modern dan setiap sistem internasional memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi “imperialisme universal”<sup>42</sup>.

Pandangan Gilpin didukung oleh Christopher Layne yang menyatakan bahwa hegemoni merupakan perubahan struktural suatu sistem dari anarki menjadi lebih hierarki dengan kehadiran hegemon<sup>43</sup>. Layne menjelaskan terdapat empat atribut yang harus dimiliki oleh hegemoni<sup>44</sup>:

1. Kekuatan militer paling kuat yang didukung oleh supremasi ekonomi.
2. Sistem internasional ditentukan oleh ambisi negara dengan kekuatan dominan. Hegemon akan bertindak untuk memenuhi *self-interest* melalui pembentukan sistem internasional yang mampu menjamin kepentingan *security*, ekonomi, dan ideologi.
3. Hegemoni merupakan polaritas. Kehadiran hegemon menciptakan sistem yang unipolar
4. Hegemoni harus memiliki *will*. Kekuatan besar yang dimiliki hegemon harus disertai dengan penggunaan power tersebut untuk memaksakan *order* dan mencapai tujuan dalam sistem internasional.

Dalam pandangan realis, hegemoni seringkali disatukan dengan unipolaritas.

---

<sup>42</sup> Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1981), 29.

<sup>43</sup> C. Layne, *The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present*, (Ithaca: Cornell University Press, 2006), 4

<sup>44</sup> C. Layne, *The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present*, 4.

Sistem unipolar juga didefinisikan sebagai kehadiran satu negara dominan. William Wohlforth menjelaskan bahwa struktur unipolar terjadi ketika kapabilitas salah satu negara terlalu besar untuk terjadi *counterbalancing* oleh negara lain. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi *power* terletak hanya pada satu negara saja. Kehadiran *power* hegemoni berbeda dari teori *balance of power*, dimana *balancing* gagal terjadi<sup>45</sup>.

Pandangan lain muncul mengenai hubungan hegemoni dengan sistem unipolar. Cornelia Beyer menjelaskan bahwa hegemoni terbatas pada kapabilitas material yang dimiliki suatu negara beserta kapasitas untuk menggunakan kapabilitas material tersebut dan *soft power*. *Soft power* merupakan kapabilitas untuk mengubah perilaku negara lain dengan mempengaruhi sistem kepercayaan dan cara negara lain berpikir<sup>46</sup>. Menurut pandangan ini, polaritas hanya terbatas pada distribusi *power* dan hegemoni merupakan produk dari usaha nyata untuk membentuk dan mempertahankan seperangka aturan internasional<sup>47</sup>. Wilkinson menambahkan bahwa sistem unipolar hanya terjadi bila suatu negara hegemon mengambil peran sebagai pemimpin untuk menggunakan kekuatan mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat kemungkinan bahwa kehadiran hegemon tidak akan menciptakan sistem unipolar karena kegagalan dalam menggunakan kekuatan atau menunjukkan sikap kepemimpinan kepada negara subordinat dalam sistem internasional<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> William C. Wohlforth 1999, "The Stability of a Unipolar World," *International Security*, 24(1), (1999):9.

<sup>46</sup> Cornelia Beyer, "Hegemony, Equilibrium, and Counterpower: A Synthetic Approach," *International Relations*, 23(2), (2009): 413.

<sup>47</sup> C.J Fettweis, "Unipolarity, Hegemony, and the New Peace," *Security Studies*, 26(3), (2017): 432.

<sup>48</sup> D. Wilkinson, "Unipolarity Without Hegemony", *International Studies Review*, 1(2), (1999): 141-172.

## ***Hegemonic Stability Theory***

*Hegemonic Stability Theory* merupakan upaya realis untuk menyatukan dua komponen yaitu power yang lebih besar dari negara lain dan penggunaan power itu untuk mencapai kepemimpinan. David Lake menyatakan bahwa *hegemonic stability theory* merupakan gabungan dari teori hegemoni dengan teori kepemimpinan<sup>49</sup>. Teori ini diawali dengan kehadiran satu negara dominan. Robert Keohane menjelaskan hegemoni sebagai negara yang memiliki sumber daya material yang lebih besar dari negara lain. Terdapat empat macam sumber daya yang harus dimiliki *hegemonic power* yaitu<sup>50</sup>:

1. Penguasaan bahan baku
2. Penguasaan modal
3. Penguasaan pasar
4. “*Competitive advantage* melalui produksi barang yang bernilai tinggi”

Teori *hegemonic stability* berusaha menjelaskan hubungan antara kekuatan hegemoni, perkembangan ekonomi, dan stabilitas politik dalam struktur internasional. Dalam sistem internasional, terdapat *power* yang dominan dalam sistem internasional untuk memastikan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik internasional. Negara dengan kekuatan hegemoni dapat menciptakan peraturan internasional yang

---

<sup>49</sup> D.A. Lake, “Leadership, Hegemony, and the International Economy: Naked Emperor or Tattered Monarch with Potential?,” *International Studies Quarterly*, 37(4), (1993): 460.

<sup>50</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), 42.

mengatur hubungan antara setiap negara dan menghukum *transgressor* dengan sanksi yang dapat diprediksi. Hukuman ini ditujukan untuk mempertahankan posisi hegemoni negara tersebut yang terancam oleh kehadiran *transgressor*. Hukuman ini juga menjadi suatu bentuk simbolis kekuatan negara hegemoni dalam menjaga stabilitas internasional<sup>51</sup>. Pandangan hegemon yang koersif dan memaksakan kehendak kemudian berubah menjadi hegemon yang mengambil peran kepemimpinan.

Charles Kindleberger menyatakan bahwa kehadiran hegemon menciptakan ekonomi dunia yang liberal<sup>52</sup>. Kekuatan hegemoni harus mampu menyediakan *public goods* untuk mencapai ekonomi yang terbuka dan liberal. Untuk mencapai ini, rezim hegemoni menciptakan prinsip, aturan, norma, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi dan keinginan aktor lain digabungkan dalam lingkup hubungan internasional<sup>53</sup>. Kepemimpinan negara hegemon mengurangi konflik antar negara dengan menciptakan norma yang dapat diterima. Pemaksaan aturan dan arbitrase permasalahan internasional merupakan cara hegemon untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem internasional<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. Mohd. Noor Mat Yazid, "The Theory Of Hegemonic Stability, Hegemonic Power And International Political Economic Stability.," *Global Journal of Political Science and Administration* Vol.3, No.6, (2015): 67-79, dipublikasikan oleh European Centre for Research Training and Development UK, ISSN 2054-6335(Print), ISSN 2054-6343.

<sup>52</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (Princeton: Princeton University Press, 1987), 72.

<sup>53</sup> Charles P Kindleberger, *The World in Depression: 1929–1939*, (Oakland, CA: University of California Press, 1973), 84.

<sup>54</sup> W.R Thompson, *On Global War: Historical Structural Approaches To World Politics*, (Columbia: University of South Carolina Press, 1988), 20-25.

Menurut Robert Gilpin, kekuatan hegemoni memberikan *public good* dalam bentuk perdamaian dan keamanan. Gilpin menegaskan bahwa kekuatan hegemoni harus mengatur hubungan politik, teritorial, dan terutama hubungan ekonomi berdasarkan kepentingan keamanan dan juga ekonomi. Kekuatan hegemoni dapat dijalankan karena banyak negara lain memperoleh keuntungan dari kepemimpinan negara hegemon dalam struktur internasional. Kemampuan negara hegemon untuk mempertahankan stabilitas ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dominasi militer dan ekonomi yang mereka miliki.

Dalam pendekatan Gilpin ini, negara hegemon menjadi negara yang koersif yaitu dengan argumen bahwa ketertiban internasional merupakan *public good*, yang memperoleh keuntungan dari negara subordinat dan negara dominan tidak hanya menyediakan *public good* tersebut namun juga dapat mengambil kontribusi dari negara subordinat untuk memenuhi “*public good*” tersebut. Meskipun negara subordinat enggan melakukan hal tersebut namun power yang dimiliki negara hegemon memaksa negara subordinat untuk mematuhi permintaan tersebut.

Brilmayer memiliki pandangan yang berbeda bahwa hegemoni membutuhkan moralitas politik. Ekspektasi setiap negara harus diperlakukan secara adil harus dipenuhi oleh hegemon sebagai bagian dari moralitas politik. Brilmayer memfokuskan pada bagaimana masyarakat internasional memandang hegemon dan bukan hegemon

itu sendiri. Kapabilitas dan kemauan actor hegemon tidak cukup namun juga pengakuan dari negara lain terhadap hegemon<sup>55</sup>.

Keohane menambahkan bahwa *hegemonic stability theory* struktur hegemoni power yang didominasi satu negara merupakan keadaan paling kondusif untuk membentuk rezim internasional yang kuat dimana aturan tersebut tepat dan dipatuhi dengan baik oleh negara lain. Sistem ekonomi yang terbuka dan liberal dapat terjamin bila pihak hegemon dapat menjalankan kepemimpinan yang diperlukan<sup>56</sup>.

*Hegemonic stability theory* kemudian berkembang menjadi kemunduran hegemoni. Hegemoni menjadi negara yang membatasi diri sendiri dan kemudian mengalahkan diri sendiri dalam kondisi sementara. Negara hegemoni membebani diri sendiri dengan menyediakan *public goods* terutama bagi negara *free-riders*. Negara hegemon terlalu berupaya menjalankan peran kepemimpinannya sehingga *cost* dari hegemon itu sendiri tidak dapat dipenuhi. Hal ini mendorong kehancuran hegemoni secara perlahan<sup>57</sup>.

Menurut *hegemonic stability theory*, kemunduran struktur *power* hegemoni dapat diekpektasi yang menandakan penurunan kekuatan hegemon dalam rezim ekonomi internasional. Keohane mempercayai bahwa kerja sama dan keberlangsungan

---

<sup>55</sup> L Brilmayer, *American Hegemony: Political Morality in a One-Superpower World*, (New Haven: Yale University Press, 1994), 156.

<sup>56</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press), 132.

<sup>57</sup> Michael Veseth, "What is International Political Economy?," *Pugetsound University*, 2017, diakses 7 Maret 2019, <http://www2.ups.edu/ipe/whatis.pdf>

rezim ekonomi internasional terbentuk setelah penurunan hegemon. Pendapat ini berbeda dari Charles Kindleberger. Hegemoni dibutuhkan untuk pembentuk rezim ekonomi internasional namun kehadiran hegemon tidak diperlukan untuk mempertahankan rezim ekonomi internasional itu sendiri<sup>58</sup>.

Mayoritas ahli teori berpendapat bahwa hanya terdapat dua hegemon dalam kurun waktu dua abad ini. Pertama, Inggris Raya dari tahun 1815 sampai 1939. Kedua, Amerika Serikat dari tahun 1945 sampai sekarang<sup>59</sup>.

### **Ketertiban dunia ‘International Order’**

Ketertiban dapat diartikan sebagai hubungan yang menjelaskan bahwa input dapat mempengaruhi tindakan suatu negara atau menghasilkan keadaan yang stabil. Keadaan yang stabil ini mendorong pada perdamaian karena tindakan setiap negara dapat diprediksi. Sementara bila ketertiban tidak ada, akan terjadi perang dan kekerasan<sup>60</sup>.

### **Kepentingan Kekuatan Hegemoni dalam sistem internasional**

Peran hegemon dalam mensponsori dan memaksakan sistem internasional dengan memaksakan visi yang dimiliki oleh negara hegemon kepada negara yang lebih lemah dengan menciptakan suatu mekanisme internasional yang dapat membantu

---

<sup>58</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press), 132.

<sup>59</sup> Goda Dirzauskaite dan Nicolae Cristinel Ilinca, “Theoretical Background,” *Understanding Hegemony in International Relations Theories*, (Aalborg: Aalborg University, 2017), 21.

<sup>60</sup> Michael J. Mazarr, et.al, “The Role of International Order in U.S. Strategy,” *Understanding The Current International Order*, (Santa Monica: RAND, 2016), 9.

pencapaian kepentingan hegemon dengan lebih efektif dan efisien. *Power* tersebut dapat memperoleh legitimasi atau tidak tetapi *order* dan aturan yang diciptakan sistem internasional merefleksikan kepentingan hegemon atau sekelompok negara yang berkuasa<sup>61</sup>. Pandangan ini memiliki argumen bahwa mekanisme pembentukan *order* digunakan oleh hegemon untuk mencapai kepentingan mereka dengan menyediakan kesempatan bagi hegemon, sarana seperti organisasi internasional, dan proses untuk mencapai kepentingan mereka melalui pembentukan perjanjian, aturan, dan norma yang mengatur sistem. Dalam mekanisme ini, kekuatan hegemon dilegitimasi melalui keterlibatan negara lain dalam menjaga *international order*. Hegemon juga memberikan tanggung jawab kepada negara lain untuk menjaga internasional order<sup>62</sup>.

### ***Economic Statecraft***

Selain *hegemonic stability theory*, penelitian ini juga menggunakan konsep *economic statecraft*. *Economic statecraft* merupakan praktek dalam hubungan internasional. Sejarah membuktikan bahwa pemerintah kerajaan Megarian melarang perdagangan antara kerajaan Megara dan Athena yaitu penggunaan ekonomi untuk tujuan politik. *Economic statecraft* dapat digunakan untuk berbagai tujuan melalui sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi dianggap sebagai ancaman terhadap untuk menarik sumber daya ekonomi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan negara target. Definisi ini tidak memasukkan *economic denials* yaitu suatu bentuk hukuman tanpa

---

<sup>61</sup> Chorev, *et.al*, "The Crisis of Neoliberalism and the Future of International Institutions: A Comparison of the IMF and the WTO," *Theory and Society*, Vol.38, No.5, (2009): 60-62.

<sup>62</sup>Quddus Z. Snyder, "Integrating Rising Powers: Liberal Systemic Theory and the Mechanism of Cooperation," *Review of International Studies*, Vol. 39, (2013): 214.



ekspektasi terhadap perubahan perilaku negara yang dituju untuk memperoleh *bargaining chips* di masa depan. Intensi dari sanksi ekonomi ini untuk mempengaruhi negara target bukan untuk menghancurkan negara target dengan kalkulasi *cost* dan *benefit* bukan dari kapabilitas. Contohnya *economic denial* kepada Irak ditujukan untuk perubahan kebijakan rezim padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menjatuhkan rezim tersebut. Amerika Serikat merupakan negara yang menggunakan bentuk *economic statecraft* dan kebijakan ekonomi koersif. Salah satu faktor pendorong *economic statecraft* adalah *willingness*, kesempatan, dan interdependensi kompleks antar negara yang lebih dipilih dibandingkan kekuatan militer yang koersif. Aplikasi sanksi ekonomi dapat menjadi pedang bermata dua yaitu negara target bekerja sama dengan negara pemberi sanksi atau negara target akan melanggar sanksi ekonomi tersebut<sup>63</sup>.

Sanksi ekonomi dan embargo membawa ironi tersendiri bagi negara pemberi sanksi. Negara pemberi sanksi lebih sering dirugikan dibandingkan negara yang diberikan sanksi. Suatu ide bahwa negara harus mengeluarkan *economic cost* lebih untuk negara yang diberikan sanksi dan telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima. Kebijakan Amerika Serikat dalam konteks ini seringkali menunjukkan ironi dibandingkan realitas yang ada. *Economic statecraft* harus digunakan dalam kalkulasi *cost* dan *benefit*. Suatu bentuk embargo seringkali menjadi simbolisme dan suatu bentuk komunikasi meskipun kalkulasi dari keuntungan dan kerugian ekonomi tidak lagi menjustifikasi kebijakan tersebut. Simbolisme atau pesan yang berusaha

---

<sup>63</sup> Steve Chan dan A.Cooper Drudy, "Sanctions as Economic Statecraft: An Overview," *Sanctions as Economic Statecraft*, (Hampshire: Palgrave, 2000), 1-5.

disampaikan seringkali diterjemahkan dalam bentuk sanksi, embargo strategis, dan economic warfare. Alasan ini juga yang menjustifikasi kebijakan yang diambil AS. Salah satu yang mendorong kebijakan sanksi ekonomi AS juga kebijakan ini dapat menguntungkan bagi *bargaining position* AS namun kebijakan ini seringkali dilatar belakangi motif lain. Pada kenyataannya, implementasi sanksi ekonomi ini belum tentu berjalan efektif. Suatu sanksi ekonomi seringkali dapat sukses atau gagal namun penilaian mengenai keberhasilan suatu penggunaan instrument ekonomi terlihat dari objektif yang berusaha dicapai. Misalnya kebijakan sanksi ekonomi Iran digunakan untuk memproyeksikan kekuatan politik-ekonomi AS mengalami kegagalan namun sanggup untuk melemahkan keadaan ekonomi Iran sehingga Iran dapat menuruti permintaan AS misalnya pelepasan tahanan. Menurut Henry Kissinger, penyampaian pesan yang tepat dari sanksi ekonomi menjadi penting<sup>64</sup>.

Sanksi ekonomi suatu negara merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang koersif. Dalam buku *Sanction Paradox* dijelaskan bahwa terdapat model kebijakan ekonomi koersif yang didasari pada dua asumsi. Asumsi pertama menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai *unitary actor* yang rasional. Asumsi kedua menjelaskan bahwa negara mengantisipasi suatu konflik politik yang sering terjadi dan terdapat efek distribusi pengaruh dan reputasi suatu negara di masa sekarang. Ketika aktor berbeda pendapat, mereka lebih peduli mengenai distribusi aset politik yang relatif dibandingkan reputasi negara mereka sebagai negara kuat. Model ini menunjukkan

---

<sup>64</sup> Alan P. Dobson, "Economic Statecraft," *US Economic Statecraft for Survival 1933-1991 : Of sanctions, embargoes and economic warfare*, (New York: Routledge, 2002), 1-10.

bahwa strategi dari kedua negara yang terlibat dalam sanksi ekonomi ditentukan oleh opportunity cost kedua negara. Ketika *opportunity cost* kedua negara mencapai *deadlock*, sanksi ekonomi seringkali tidak berguna. Di sisi lain, ekspektasi konflik memiliki efek kontradiktif terhadap kebijakan ekonomi yang koersif. Ketika negara mengantisipasi konflik di masa depan, negara akan lebih memilih sanksi ekonomi sebagai *leverage* dalam kebijakan luar negeri. Sementara itu, negara target dengan ekspektasi terhadap konflik akan mengurangi konsesi. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi sebagai upaya negara untuk memposisikan kembali negara tersebut dalam sistem internasional juga untuk menggeser keadaan konflik yang ada<sup>65</sup>.

## 1.6 Kajian Literatur

Jurnal *The Impact of UN and US Economic Sanction on GDP Growth* oleh Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier menyatakan bahwa sanksi ekonomi telah menjadi alat penting dalam *statecraft* di dalam politik internasional sebagai cara suatu pemerintah untuk memaksakan kepentingan negara. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyebabkan kerugian ekonomi pada negara yang diberikan sanksi ekonomi. Pendekatan ini dianggap lebih *non-violent* dibandingkan intervensi militer. Pandangan ini kemudian dikritik karena sanksi ekonomi seringkali merugikan masyarakat sipil dan

---

<sup>65</sup> Daniel W. Drezner, "Model of Economic Coercion," *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 27-29.

memperikan dampak bagi situasi kemanusiaan di negara tersebut seperti penyediaan makanan dan air bersih serta akses terhadap pelayanan kesehatan<sup>66</sup>.

Jurnal ini menjelaskan mengenai data sanksi yang diterapkan oleh AS dan PBB pada jangka waktu 1976-2012 yang dikategorikan menjadi tiga level yaitu ringan, moderat, dan parah. Sanksi yang ringan meliputi pelarangan persenjataan militer oleh PBB dan pelarangan bantuan asing seperti kredit serta penjualan produk atau teknologi tertentu oleh Amerika Serikat. Sanksi moderat seperti embargo minyak oleh AS dan larangan ekspor impor dan investasi asing oleh Amerika Serikat. Sanksi parah seperti embargo terhadap semua kegiatan ekonomi oleh PBB dan sanksi ekonomi terhadap seluruh kegiatan ekonomi oleh AS<sup>67</sup>. Jurnal ini menyimpulkan bahwa sanksi multilateral yang yang dijalankan PBB dan sanksi unilateral Amerika Serikat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan GDP negara dan penyebab sanksi ekonomi adalah konflik intra-negara, tendensi ke kepemimpinan otokrasi, dan represi politik. Sanksi multilateral PBB menyebabkan penurunan GDP yang lebih parah dibandingkan sanksi unilateral oleh Amerika Serikat. Namun sanksi ini seringkali tidak mencapai tujuan awal sanksi yaitu kepentingan PBB yang sampai sekarang belum jelas dan merugikan masyarakat kecil dibandingkan elit politik<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier, "The Impact of UN and US Economic Sanctions on GDP Growth", *Joint Discussion Paper Series in Economics*, No.24, (2014): 3-4.

<sup>67</sup> Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier, "The Impact of UN and US Economic Sanctions on GDP Growth", "9.

<sup>68</sup> Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier, 22.

Jurnal *The Impact of Sanctions on the Economy of Iran* oleh Ali Fehge Majidi dan Zahra Zarouni menyatakan bahwa penggunaan sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri sebagai suatu upaya untuk melemahkan negara target untuk mengubah hubungan menjadi sesuai dengan negara pemberi sanksi. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat memberikan sanksi pada Iran yang disebabkan oleh perkembangan senjata nuklir, dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dua alasan utama yang mendorong penerapan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran adalah kekuatan dari sanksi ekonomi terhadap Iran yang dapat menciptakan *economic vulnerability* dan Amerika Serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia dan setiap pemerintah dan negara ingin berpartisipasi dan berkompetisi dalam pasar AS. Sanksi ekonomi terutama embargo minyak Iran diprediksikan akan menghasilkan sanksi berupa resesi Iran, inflasi yang tinggi, peningkatan pengangguran, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, korupsi, peminjaman uang, penyelundupan, dan pencucian uang. Selain konsekuensi negatif, sanksi ekonomi terhadap Iran juga membawa konsekuensi positif yaitu perubahan ketergantungan Iran terhadap aktivitas perdagangan minyak dan hubungan antara Amerika dengan institusi finansial Iran terputus akibat sanksi ini sehingga pemerintah AS memperkuat ekonomi domestik dengan lokalisasi dan *self-sufficiency*<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Ali Fehge Majidi dan Zahra Zarouni, "The Impact of Sanctions on the Economy of Iran." *International Journal of Resistive Economics*, vol. 4, issue 1, (2016): 85-88, 96-97.

Jurnal *The Burden of Economic Sanctions on Iranian-Americans* oleh Kian Arash Meshkat menjelaskan mengenai dampak *Iranian Transaction and Sanction Regulation (ITSR)* yaitu mengenai implikasi domestik mengenai kebijakan luar negeri yang agresif terhadap rezim Iran yang didasari oleh dimensi konstitusional dan regulasi terutama oleh Office of Foreign Asset Control. Iran merupakan negara pertama yang mengaktifkan *IEEPA* di bawah *Iranian Assets Control Regulation* yang mendorong pada ekspansi pelarangan terhadap semua bentuk perdagangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang diawali dengan penyanderaan warga negara Amerika Serikat oleh Iran yang melanggar prinsip hukum internasional yaitu imunitas diplomatik sehingga presiden Carter mengklaim tindakan ini sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional AS<sup>70</sup>. Sanksi terhadap rezim di Iran terus meningkat akibat ketegangan politik yang diperparah oleh pelanggaran Iran seperti pembangunan senjata nuklir dan tindakan terorisme. Jurnal ini memberikan pandangan bahwa ambiguitas legalitas sanksi AS terhadap Iran juga merugikan dan tidak mampu melindungi komunitas masyarakat Iran yang berada di dalam AS karena ketidakmampuan AS untuk menerapkan administrasi ITSR<sup>71</sup>.

Ketiga jurnal ini kurang menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mampu menggunakan kebijakan sanksi ekonomi sebagai kebijakan luar negeri AS untuk memproyeksikan *power* AS dan juga untuk mencapai tujuan dan objektif AS seperti

---

<sup>70</sup> Kian Arash Meshkat, "The Burden of Economic Sanctions on Iranian-Americans," *Georgetown Journal of International Law*, (2012): 917-918, 922-923.

<sup>71</sup> Kian Arash Meshkat, "The Burden of Economic Sanctions on Iranian-Americans," 972.

untuk mencegah kekuatan dan pengaruh Iran di Timur Tengah. Ketiga jurnal ini juga fokus terhadap hubungan antara dua aktor negara yaitu Amerika Serikat dan Iran serta konsekuensi kebijakan AS terhadap perekonomian Iran. Belum ada jurnal yang membahas kebijakan luar negeri AS terhadap aktor non-negara seperti perusahaan multinasional yaitu perusahaan ZTE. Kebijakan luar negeri berupa sanksi terhadap perusahaan ZTE merupakan suatu kebijakan luar negeri AS yang dapat berpengaruh pada hubungan ekonomi AS dengan China serta hubungan AS dengan Iran. Pelanggaran yang dilakukan oleh ZTE juga berkaitan dengan hubungan antara China dengan Amerika Serikat dan Iran.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penggunaan partisipan, situs yaitu dokumen dan materi visual yaitu melalui dokumen yang memiliki topik relevan di dalam studi ini yang dapat diperoleh dengan observasi kualitatif, *interview* kualitatif, dokumen kualitatif, dan materi visual dan audio kualitatif seperti fotografi, objek seni, *website*, dll. Metode kualitatif melibatkan analisis data dari pengumpulan data, menuliskan penemuan, menganalisis, melakukan laporan dan menyusunnya dalam bentuk naratif<sup>72</sup>.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pengertian dan esensi dari studi kasus menunjukkan suatu tendensi untuk menjelaskan

---

<sup>72</sup> John W. Cresswell, "Data Collective Procedures," *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches fourth edition*, (California : Sage Publications, 2014), 66.

suatu keputusan atau seperangkat keputusan yaitu mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana suatu keputusan diimplementasikan dan efek apa yang disebabkan oleh keputusan tersebut. Studi kasus merupakan suatu penelitian empiris yang menginvestigasi suatu fenomena kontemporer dengan konteks dalam kehidupan nyata yaitu batasan antara fenomena dan konteks belum terlihat jelas. Pendekatan studi kasus juga berusaha untuk menguji proposisi suatu teori yang dikaitkan dengan unit yang berada dalam suatu kasus atau fenomena, logika yang melatabelakangi penemuan tersebut serta kriteria untuk menginterpretasikan penemuan tersebut<sup>73</sup>.

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dibahas ke dalam empat bab. Bab kedua membahas perubahan hubungan Amerika Serikat dengan Iran. Hubungan AS dengan Iran melewati tiga tahapan dari kerjasama, konflik, dan kompetisi. Hubungan AS dengan Iran diawali dengan kerja sama pada era Shah Reza Pahlevi ketika Perang Dunia II berlangsung sampai awal Perang Dingin. Hubungan berubah menjadi konflik pada kebijakan nasionalisasi Pemerintahan Mohammad Mossadeq dan puncak konflik terletak pada penyanderaan kedubes AS pada revolusi islam tahun 1979. Hubungan ini berakhir pada kompetisi antara Iran dengan AS sebagai aliansi dari Israel.

Bab ketiga membahas kasus sanksi ekonomi yang diberikan AS kepada perusahaan ZTE yang melanggar sanksi ekonomi Iran. Bab ketiga akan dibagi ke dalam

---

<sup>73</sup> Robert K. Yin, "Introduction," *Case Study Research : Design and Methods*, (London : Sage Publication, 1984), 22-23,29-37.



empat bagian. Bagian pertama membahas pembentukan *international order* ala AS. Bagian kedua membahas *Global Wars on Terrorism* dan *Rogue States* sebagai norma internasional baru. Bagian ketiga membahas pelanggaran perusahaan ZTE beserta dampaknya. Bagian keempat membahas hubungan antara AS sebagai hegemon dengan Iran dan China beserta penggunaan sanksi ekonomi sebagai *economic statecraft*.

Bab keempat membahas kesimpulan merupakan penemuan dari cara, alasan, dan dampak pemberian sanksi ekonomi kepada perusahaan ZTE untuk mempertahankan hegemoni AS.